



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Mayjend. S. Parman No. 2 Kendari, Telp. 0401-3126053 Fax. 0401-3126172  
website : dpmptsp.sultraprov.go.id - email : info.dpmptsp@sultraprov.go.id



**DETAIL DAN DAFTAR PERSYARATAN IZIN**

Nama Izin : PENCIUTAN/REVISI KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
Deskripsi : PENCIUTAN/REVISI KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
Sektor : ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Delegasi : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Biaya : Tidak Ada  
Durasi : 14 hari kerja  
Perubahan Terakhir : 22 May 2018, Pukul 05:46:52 WITA  
Dicetak Pada : 18 Jun 2024, Pukul 17:41:55 WITA

**Persyaratan - Baru**

No	Syarat	Deskripsi	Jenis Pemohon	Ket.	Format Persyaratan
1	Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai dan distempel basah (tanda tangan dan cap perusahaan asli bukan scan)	Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai dan distempel basah (tanda tangan dan cap perusahaan asli bukan scan)	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
2	Rekaman Identitas Pemohon	Rekaman Identitas Pemohon	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
3	Rekaman NPWP Pemohon	Rekaman NPWP Pemohon	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
4	Rekaman NPWP Perusahaan	NPWP Perusahaan	Perusahaan	Wajib	-
5	Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional, yang memuat permohonan wilayah yang dicitkan dan wilayah yang dipertahankan	Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional, yang memuat permohonan wilayah yang dicitkan dan wilayah yang dipertahankan	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
6	Bukti pelunasan pembayaran kewajiban keuangan sesuai dengan tahap kegiatan IUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan	Bukti pelunasan pembayaran kewajiban keuangan sesuai dengan tahap kegiatan IUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
7	Bukti pembayaran PNBPU uang pencadangan wilayah dan pencetakan peta	Bukti pembayaran PNBPU uang pencadangan wilayah dan pencetakan peta	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
8	Laporan kegiatan sesuai status tahap kegiatan IUP terakhir yang memuat data dan informasi potensi, sumber daya, dan/atau cadangan pada wilayah yang dimohonkan untuk dicitkan	Laporan kegiatan sesuai status tahap kegiatan IUP terakhir yang memuat data dan informasi potensi, sumber daya, dan/atau cadangan pada wilayah yang dimohonkan untuk dicitkan	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-
9	Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dimohonkan untuk dicitkan bagi IUP tahap kegiatan eksplorasi atau untuk IUP tahap kegiatan operasi produksi, laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang telah dilaksanakan mencapai tingkat keberhasilan reklamasi dan pascatambang 100 % pada wilayah yang akan	Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dimohonkan untuk dicitkan bagi IUP tahap kegiatan eksplorasi atau untuk IUP tahap kegiatan operasi produksi, laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang telah dilaksanakan mencapai tingkat keberhasilan reklamasi dan pascatambang 100 % pada wilayah yang akan dicitkan yang	Perorangan, Perusahaan	Wajib	-

	diciutkan yang telah disetujui oleh pemerintah	telah disetujui oleh pemerintah			
10	Surat Kuasa Surat kuasa bermaterai bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha	Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha	Perorangan, Perusahaan	Optional	-
11	Rekaman KTP Kuasa	Foto Copy KTP Kuasa	Perorangan, Perusahaan	Optional	-
12	Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik)	Berkas Persyaratan 2 Rangkap (khusus permohonan offline dengan berkas fisik)	Perorangan, Perusahaan	Optional	-